

Tinjauan Sekuritisasi dalam Dinamika Hubungan Arab Saudi dengan Muslim Brotherhood Pasca-Arab Spring

Rifan Kalbuadi

Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia

e-mail : rifan.kalbuadi@ui.ac.id

Abstract

In March 2014, Saudi Arabia, through a royal decree, designated the Muslim Brotherhood (MB) as a terrorist organization. This decision has influenced the geopolitical dynamics of the Middle East to this day as Saudi Arabia is one of the strongest actors in the region. The designation of MB as a terrorist organization was a response from the Saudi government to MB's involvement in the Arab Spring 2011 and the Saudi allegations of MB's involvement in the removal of Egyptian President Hosni Mubarak and various anti-government protests that spread in several Middle Eastern countries. The Saudis did not always see MB as a threat. There was a time when the relationship between the two had occurred in harmony so that in this case, there had been a shift in perception. This paper analyzes this phenomenon using the theory of securitization by including the components of securitization as a framework for analysis. The author argues that the strengthening of MB on the political scene of the Middle East with its efforts to implement modernist Muslim ideology and offer democracy through a revolution is the cause of the shift in the perception of Saudi Arabia towards MB.

Keywords: *Muslim Brotherhood, Saudi Arabia, security threat, Securitization Theory.*

Abstrak

Pada Maret 2014, Arab Saudi, melalui keputusan kerajaan, menetapkan Muslim Brotherhood (MB) sebagai organisasi teroris. Keputusan ini telah memengaruhi dinamika geopolitik Timur Tengah hingga hari ini karena Arab Saudi merupakan salah satu aktor kuat di kawasan. Penetapan MB sebagai organisasi teroris merupakan respons pemerintah Saudi atas keterlibatan MB dalam Arab Spring 2011 serta adanya dugaan Saudi mengenai keterlibatan MB dalam lengsernya Presiden Mesir Hosni Mubarak dan berbagai aksi protes anti-pemerintah yang menyebar di beberapa negara Timur Tengah. Saudi tidak selalu melihat MB

sebagai sebuah ancaman. Ada masa ketika hubungan keduanya pernah berlangsung secara harmonis, sehingga dalam kasus ini telah terjadi pergeseran persepsi. Tulisan ini menganalisis fenomena tersebut dengan menggunakan Teori Sekuritisasi dengan memasukan komponen-komponen sekuritisasi sebagai kerangka analisis. Penulis berargumen bahwa semakin menguatnya MB dalam panggung politik Timur Tengah dengan upayanya menerapkan ideologi muslim modernis dan menawarkan demokrasi melalui sebuah revolusi merupakan penyebab pergeseran persepsi Arab Saudi terhadap MB.

Kata kunci: Arab Saudi, ancaman keamanan, Muslim Brotherhood, Teori Sekuritisasi.

Pendahuluan

Aktor utama politik dunia adalah negara, tetapi mereka bukan satu-satunya. Meningkatnya jenis aktor non-negara dalam beberapa tahun terakhir menantang dan bahkan melemahkan konsep “state-centric” dari politik internasional dan menggantinya dengan sistem “transnasional” yang cukup kompleks (Ataman, 2003). Terdapat perdebatan mengenai apakah negara tetap dianggap sebagai aktor terpenting dan apa peran yang dimainkan aktor non-negara dalam politik dunia (Weenink, 2001). Munculnya aktor non-negara dalam politik global memiliki konsekuensi dalam implementasi kebijakan luar negeri (Stengel & Baumann, 2017). Sejak 1980, banyak kajian mulai menyoroti berbagai kategori aktor non-negara, seperti gerakan Islamis sebagai aktor non-negara transnasional (Charountaki, 2018). Gerakan Islamis adalah aktor politik yang cukup berpengaruh di Timur Tengah dan dalam tingkat global, menciptakan banyak mata rantai, mulai dari sosial, budaya, hingga politik yang melampaui pemerintah (state). Gerakan Islamis seringkali dijadikan sasaran oleh negara dalam melakukan keseimbangan kekuasaan di Timur Tengah (Dalacoura, 2001). Fenomena ini dapat dilihat dalam dinamika hubungan Arab Saudi dan Muslim Brotherhood (MB).

Pada Maret 2014, Saudi menetapkan MB sebagai organisasi teroris (Kirkpatrick, 2014). Dalam hampir satu abad keberadaannya, MB dapat dikatakan sebagai organisasi Islam tertua, terbesar dan paling berpengaruh di dunia (Leiken & Brook, 2007). Kemampuan aktor non-negara seperti MB untuk “accomplish a lot with a little” telah memaksa banyak pihak untuk mengkaji kembali konsepsi keamanan (Vermonte, 2003), tidak tekecuali Saudi. Penetapan MB sebagai organisasi teroris oleh Saudi mengilas balik kepada peristiwa Arab Spring 2011 dimana terjadi pemberontakan rakyat, yang menuntut Presiden Mesir Hosni Mubarak untuk mundur dari 30 tahun masa

kepemimpinannya. Mubarak dilengserkan dan MB bangkit ke dalam arus politik utama Mesir. Pasca peristiwa tersebut, MB memenangkan sejumlah kursi di parlemen dan membawa kandidat mereka Mohammed Morsi sebagai presiden pertama yang terpilih secara langsung. Pada Juli 2013, Morsi digulingkan dari kursi kepresidenan oleh militer diikuti dengan penangkapan dan pemenjaraan para anggota MB lainnya.

Secara historis, Saudi tidak selalu melihat MB sebagai sebuah ancaman. Faktanya, para anggota MB diketahui pernah menjadi bagian dari upaya reformasi sistem pendidikan Saudi. Munculnya Gamal Abdel Nasser pada tahun 1954 memperkuat persahabatan Saudi dan MB dimana Nasser mengusir banyak anggota MB dari Mesir selama tahun 1950-an. Para anggota MB pada masa itu mengungsi ke Saudi dan selama era tersebut, Saudi dan MB memiliki tujuan yang sama dalam menentang pengaruh Nasser. Namun gelombang Arab Spring yang dimulai tahun 2011 menimbulkan sejumlah tantangan baru bagi Saudi. Arab Spring adalah istilah yang merujuk pada gelombang aksi demonstrasi massa di berbagai negara di Timur Tengah, yang umumnya bertujuan memprotes pemerintahan di negara mereka masing-masing dan menuntut demokratisasi. Peristiwa ini telah memunculkan dinamika regional yang berpotensi mengganggu kepentingan nasional Saudi. Negara monarki ini berusaha mengelola situasi dengan mengawasi stabilitas domestik dan mempertahankan posisi eksternalnya.

Perkembangan ini memunculkan pertanyaan penelitian, mengapa Arab Saudi mengubah persepsinya tentang Muslim Brotherhood sebagai sebuah ancaman keamanan pasca terjadinya peristiwa Arab Spring? Penulis menggunakan Teori Sekuritisasi untuk mengkaji masalah ini. Sekuritisasi adalah proses dimana sebuah aktor negara mengubah sebuah isu menjadi persoalan keamanan; sebuah aksi politisasi yang memungkinkan cara-cara luar biasa agar dapat digunakan atas nama keamanan (Buzan, et al., 1998: 25).

Kajian terdahulu mengenai hubungan Saudi dengan MB pasca-Arab Spring menekankan pada dua sudut pandang yakni politik domestik Saudi dan kajian keamanan Saudi. Sudut pandang pertama, yakni politik domestik Saudi, melihat adanya upaya Saudi untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan stabilitas pasca terjadinya Arab Spring dimana terjadi banyak gejolak politik dan keamanan di Timur Tengah. Saudi merespon Arab Spring dengan strategi politik, ekonomi, dan militer, baik secara internal maupun eksternal (Hedges and Cafiero, 2017).

Pemerintah Saudi melihat kemenangan MB dalam politik di Mesir berpotensi menyebar ke negaranya karena MB adalah aktor nonnegara yang berjejaring secara transnasional. Tren kebangkitan kelompok Islamis, dalam hal ini dimotori MB yang telah

memutuskan untuk terlibat dalam politik melalui pemilihan umum di Mesir, telah memunculkan kekhawatiran Saudi (Al-Rasheed, 2013). Saudi berkeinginan untuk menahan tren kebangkitan tersebut dengan cara menolak MB dan membangun koalisi regional, yaitu menekankan negara lain agar mengikuti jejaknya. Uni Emirat Arab, Jordan, Kuwait, dan Bahrain pun mengikuti jejak Saudi dengan menolak kehadiran MB dalam wilayah domestik mereka (Darwich, 2017).

Dari sudut pandang kedua, yakni kajian keamanan Saudi, penulis melihat bahwa ada tindakan keseimbangan kekuasaan regional yang berjalan untuk mengelola kepentingan internal dan eksternal Saudi guna mempertahankan status quo. Namun, ada rasa kecemasan yang telah mendorong Saudi dengan melihat persepsi historis mereka seputar ancaman ideologi. Sejauh ini belum dilakukan kajian yang secara spesifik membahas proses penetapan MB sebagai kelompok teroris oleh Saudi dan bagaimana persepsi ancaman itu terbentuk di pihak Saudi. Atas dasar itu, penulis akan menjawab pertanyaan tersebut dengan menggunakan teori sekuritisasi sebagai kerangka analisis. Tulisan ini akan dibagi dalam sejumlah bagian, yaitu pendahuluan, teori sekuritisasi, pembahasan yang akan mencakup empat sub kajian, yaitu Hubungan Arab Saudi-Muslim Brotherhood, Persepsi Ancaman Saudi Arabia, *Existential Threat*: Evolusi, Ideologi dan Identitas Muslim Brotherhood, serta Sekuritisasi Terhadap Muslim Brotherhood; dan terakhir simpulan.

Teori Sekuritisasi

Teori sekuritisasi dikembangkan oleh Copenhagen School, nama yang mengacu pada sekelompok kecil ahli teori Hubungan Internasional, dengan Barry Buzan dan Ole Wæver sebagai anggota paling terkemuka. Disebut demikian karena sebagian besar tulisan muncul dari Conflict and Peace Research Institute (COPRI) di Kopenhagen pada 1990-an (Stritzel, 2014:12). Sekuritisasi digambarkan sebagai proses intersubjektif yang dilakukan secara sosial dimana ancaman terhadap suatu objek tertentu diakui dan dianggap layak untuk dilindungi (Charrett, 2009). Hal ini menjelaskan sebuah fenomena politik melalui adanya karakter keamanan dari sebuah masalah publik, komitmen sosial yang dihasilkan dari penerimaan kolektif bahwa suatu fenomena merupakan sebuah ancaman dan kemungkinan diperlakukannya sebuah kebijakan tertentu (Balzacq et al., 2016). Sekuritisasi menjelaskan bagaimana sebuah aktor keamanan memobilisasi audience dengan memimpin sebuah langkah keamanan untuk mengimplementasikan extraordinary means untuk sebuah isu keamanan (Lenz-Raymann, 2014: 244).

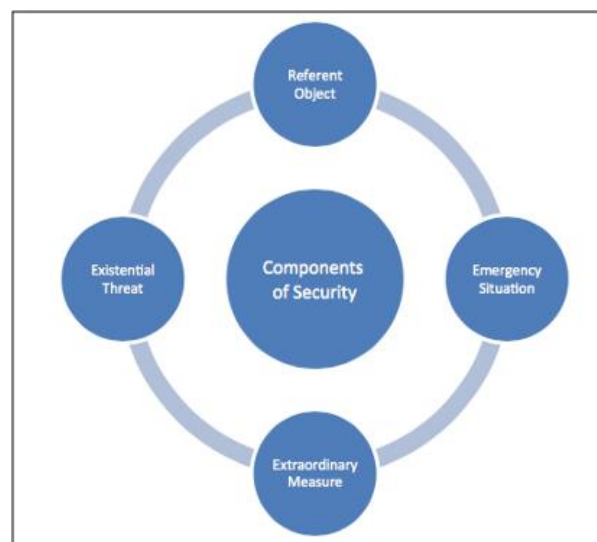
Teori sekuritisasi menafsirkan tiga fitur umum konsep keamanan. Pertama, bahwa konsep keamanan selalu dikaitkan dengan sebuah gagasan ancaman yang bisa berbentuk apa saja. Namun, untuk dianggap sebagai masalah keamanan, mereka harus

menimbulkan tingkat tantangan terhadap nilai-nilai yang dihargai (yaitu ideologi, integritas, identitas) dari objek referensi keamanan (negara, pemerintah, rezim). Kedua, istilah keamanan pada dasarnya bersifat subyektif, artinya tidak akan ada konsensus universal mengenai definisi "keamanan." Fitur ketiga adalah bahwa istilah "keamanan" pada dasarnya bersifat politis. Ini berarti aktor yang bertanggung jawab untuk menangani masalah yang menantang tidak selalu wajib memilih untuk menggunakan pendekatan keamanan. Sekuritisasi didefinisikan sebagai proses di mana aktor menyatakan masalah tertentu, yang menyatakan adanya ancaman eksistensial terhadap objek referensi tertentu (Kurniawan, 2018:13).

Ada tiga tingkatan dalam menangani masalah keamanan yang mengancam keberadaan objek rujukan dalam proses sekuritisasi, yakni; *non-politicized*, *politicized* dan *securitized* (Sezer, 2013). Tingkat *non-politicized* diambil dari agenda suatu negara yang mencakup masalah-masalah yang tidak diperhatikan oleh publik dan karenanya tidak perlu ditangani oleh negara. Tingkat *politicized* mendapat perhatian yang lebih besar oleh publik dan pemerintah dan merupakan bagian dari kebijakan publik yang membawa masalah tersebut ke dalam agenda pemerintah. Masalah-masalah ini dibahas oleh publik, sebelum pemerintah kemudian memutuskan bagaimana menghadapinya.

Level securitized termasuk prioritas utama, dan masalah-masalah mendesak. Level ini melibatkan *existensial threat* terhadap *referent object*, dengan diperlukan *extraordinary measure* dalam mengatasi sebuah ancaman (Sezer, 2013).

Bagan 1. Komponen Keamanan



Sumber: Kurniawan, 2018.

Sebagaimana dapat dilihat di bagan di atas, Kurniawan memperlakukan sekuritisasi sebagai proses pengambilan keputusan untuk penggunaan tindakan luar biasa dengan mengusulkan empat konsep penting untuk memahami keamanan dalam konteks teori sekuritisasi yakni: (1) *existential threat* atau ancaman eksistensial, (2) *referent object* atau objek rujukan, (3) *emergency situation* atau situasi darurat, dan (4) *extraordinary measures* atau tindakan luar biasa.

Ancaman eksistensial mengacu pada dominasi satu masalah yang sangat berbeda dibandingkan dengan yang lain, dan karenanya harus menerima prioritas tertentu (Sezer, 2013). Ancaman eksistensial dianggap sebagai ancaman terhadap keberadaan sesuatu, biasanya negara. Tujuan sekuritisasi tidak hanya untuk menilai apakah ancaman secara objektif mengancam keberadaan objek referensi; melainkan menciptakan pemahaman tentang apa yang dirasakan, dipertimbangkan, dan ditanggapi sebagai ancaman. Jadi, jika seorang aktor sekuritisasi mendefinisikan sesuatu sebagai ancaman eksistensial terhadap sebuah objek referensi, ini disebut sebagai sebuah langkah sekuritisasi (Lenz-Raymann, 2014: 246). Ini bisa dilihat sebagai tantangan dalam kasus ini karena tidak seperti ancaman tradisional yang lebih mudah diidentifikasi melalui ancaman militer yang ada, ancaman non-tradisional relatif lebih sulit diidentifikasi (Taufika, 2020).

Objek rujukan (*referent object*) adalah hal yang dianggap terancam secara eksistensial dan yang memiliki klaim untuk bertahan (Buzan, et al., 1998: 21). Objek rujukan dirangkum ke beberapa poin yakni negara, dalam hal keamanan militer; kedaulatan nasional atau ideologi, dalam hal keamanan politik; ekonomi nasional, dalam hal keamanan ekonomi; identitas kolektif, dalam hal keamanan sosial dan; spesies atau habitat, dalam hal keamanan lingkungan (Emmers, 2004). Kurniawan berargumen bahwa setelah mengakui adanya isu keamanan, langkah selanjutnya adalah deklarasi situasi darurat (Kurniawan, 2018: 19). Dengan mendeklarasikannya, negara akan mengklaim hak untuk menggunakan segala cara yang diperlukan untuk hal yang mengancam, hal ini dinamakan tindakan luar biasa. Tindakan luar biasa mengacu pada "penggunaan keamanan untuk melegitimasi penggunaan kekuatan sebagai cara bagi negara untuk mengambil langkah khusus" (Buzan, et al., 1998: 21).

Kurniawan mengolah kembali kajian Buzan dan mengusulkan empat komponen sekuritisasi, yakni; *speech act*, *securitizing actor*, *audience*, dan *facilitating condition* (Buzan, et al., 1998: 21). Pertama, dengan melihat *speech act*, Kurniawan mengutip Vuori (2008) dan membagi *speech act* menjadi lima jenis dengan tujuannya masing-masing.

Bagan 2. Komponen Sekuritisasi



Sumber: Kurniawan, 2018

Tipe pertama adalah *assertive speech act* (pernyataan dan penjelasan); kedua adalah *directive speech act* (pesanan, permintaan, dan perintah); ketiga adalah *commissive speech act* (sumpah, ancaman, dan karantina); keempat adalah *tindak expressive speech act* di mana penutur mengungkapkan perasaan dan rasa terima kasih tentang sebuah keadaan; terakhir adalah *declarative speech act* (mendeklarasikan perang, atau mengatur pertemuan. *Speech act* dinilai sebagai alat kekuasaan dan merealisasikan tindakan spesifik. Balzacq berargumen bahwa kekuatan dari sebuah kata-kata tergantung pada konteks dan posisi kekuatan agen yang mengucapkannya; validitas relatif dari pernyataan-pernyataan yang diminta persetujuannya dari persetujuan; dan cara aktor sekuritisasi membuat kasus untuk suatu masalah, yaitu, strategi diskursif yang ditampilkan (Balzacq, 2011).

Securitizing actor didefinisikan sebagai aktor yang memiliki kedaulatan untuk memutuskan tindakan apa yang harus diambil begitu pengecualian tersebut terjadi (Kurniawan, 2018: 22). Ini mengacu pada otoritas negara seperti pemimpin politik, birokrasi, dan pemerintah (Buzan et al., 1998:40). Komponen ketiga yakni *facilitating condition* termasuk tata bahasa atau plot keamanan, modal sosial dan mengutip Vuori yang menyatakan bahwa *facilitating condition* adalah kondisi yang terkait dengan

ancaman. Tidak ada cara spesifik untuk mendefinisikan komponen terakhir yakni audience. Para pengkaji telah menentang konsep ini dan menganggapnya sebagai salah satu kelemahan dalam teori sekuritisasi. Menurut Buzan sebuah masalah dapat disekuritisasikan hanya jika dan ketika audiens menerimanya demikian (Buzan et al., 1998:25). Balzacq berargumen bahwa audiens penting untuk teori sekuritisasi karena kunci asumsi dari teori ini adalah bahwa sekuritisasi adalah proses intersubjektif, yang tergantung pada persetujuan audiens (Balzacq, 2011:499).

Penggunaan teori sekuritisasi untuk membahas permasalahan ini dipilih karena relevansinya sebagai kerangka teoritis dalam upaya memahami kebijakan Saudi perihal isu keamanan. Teori sekuritisasi dapat memahami sebuah fenomena tertentu dari perspektif keamanan yang merupakan bagian utama dari tulisan ini. Teori Sekuritisasi berupaya melakukan transformasi suatu isu menjadi sebuah ancaman keamanan eksistensial, yang memungkinkan adanya penerapan cara-cara luar biasa untuk membangun keamanan.

Tujuan teori sekuritisasi dalam hal ini bukan digunakan hanya untuk menilai apakah suatu ancaman secara obyektif mengancam keberadaan suatu obyek rujukan; melainkan untuk menciptakan pemahaman tentang apa yang dianggap, dan ditanggapi sebagai sebuah ancaman. Oleh karena itu, penelitian ini akan mencoba menganalisis bagaimana Saudi memandang keamanannya, dan bagaimana pemahaman mereka tentang adanya potensi ancaman tersebut pada akhirnya memengaruhi kebijakan-kebijakan yang diimplementasikannya pasca-Arab Spring.

Hubungan Arab Saudi dan Muslim Brotherhood

Saudi tidak selalu melihat Muslim Brotherhood (MB) sebagai sebuah ancaman. Sepanjang sejarah, sejak pertemuan bersejarah antara mendiang Raja Abdulaziz Al Saud dan pendiri MB, Hassan al-Banna pada tahun 1936, hubungan di antara keduanya telah terombang-ambing di antara harmoni dan ketegangan. Al Saud menawarkan bantuan keuangan untuk MB dan sebagai imbalannya, MB membantu pembentukan sistem peradilan Saudi. Pada tahun 1954, Gamal Abdel Nasser, Presiden ke-2 Mesir mengusir banyak anggota MB dan mereka mencari perlindungan ke Saudi. Saudi menyambut anggota MB dan merekrut mereka yang berpendidikan tinggi ke dalam sistem pendidikan Saudi.

Selanjutnya, pada tahun 1990 MB menentang atas invasi Kuwait oleh Presiden Irak, Saddam Hussein. Saudi menggandeng AS untuk memimpin serangan balik terhadap Irak, tetapi MB menentang diizinkan tentara asing masuk ke wilayah Saudi. Pemerintah Saudi tidak menghiraukan penentangan itu dan hal ini memicu protes dari aktivis MB di Saudi yang menuntut reformasi politik. Sepanjang 1990-an, Saudi mengusir

MB sambil membatasi kegiatan mereka karena secara terbuka mengkritik pemerintah (Hedges & Cafiero, 2017). Pada tahun 2000, hubungan antara Saudi dan MB dinilai kondusif dengan adanya kesepakatan, MB setuju untuk menahan diri dari mengkritik Saudi dan sebagai konsesinya, Saudi mengizinkan mereka untuk melanjutkan aktivitas.

Ketika membahas tentang hubungan MB dan Saudi, penting untuk menekankan perbedaan antara Islamisme dan Wahhabisme dalam sudut pandang MB. Sejak pendudukan semenanjung Arab pada awal abad ke-20, Saudi telah bersekutu dengan para pendukung ajaran Wahhabi atau kelompok Wahhabisme. Kelompok ini adalah pengikut ajaran al-Wahhab yang muncul di akhir tahun 1700-an. (Macris, 2016). Wahhabisme dianggap sebagai ideologi Salafi di mana selama tahun 1970-an, Salafisme terkait erat dengan Wahhabisme di banyak masyarakat Muslim (Lauzière, 2016,: 200).

Selama tahun 1970-an Salafi membedakan diri mereka dari aktivitas Islamisme MB dipandang terlalu fokus pada politik. Wahhabisme dan Salafisme umumnya berfokus pada kembalinya praktik-praktif Islam seperti yang dilakukan di masa Nabi Muhammad, sementara Islamisme MB berfokus pada memasukkan nilai-nilai Islam pada kehidupan masyarakat modern melalui reformasi bertahap.

Persepsi Ancaman Saudi Arabia

Untuk dapat memahami *referent object* dalam kasus ini, penting untuk mengkaji terhadap apa yang telah lama menjadi kepentingan Saudi, juga apa yang ingin di dilindungi. Stabilitas politik dan sosial internal dan kemakmuran ekonomi mewakili tujuan domestik utama Saudi (Gallarotti & Al-Filali, 2012). Secara historis, sumber kekuatan utama Saudi yang paling konsisten di tingkat domestik, regional dan global bukanlah pendapatan dari minyak, tetapi kekuatan budaya yang mewarisi sebuah negara yang merupakan ibu kota dunia komunitas Muslim (Gallarotti & Al-Filali, 2012). Strategi keamanan regional Saudi dinilai konsisten dalam beberapa dekade dengan tujuan utama menjaga keamanan rezim dalam menghadapi ancaman militer regional konvensional dan tantangan ideologis transnasional terhadap stabilitas politik dalam negeri dan legitimasi rezim (Gause, 2011a:169).

Terdapat beberapa peristiwa penting dalam sejarah Saudi yang telah membentuk persepsi ancamannya. Pertama, Saudi mempunyai sejarah kecemasan keamanan dengan kelompok Hashemit di Yordania. Sepanjang tahun 1940-1950-an Raja Abdullah, penguasa Transjordan, mempunyai ambisi untuk menciptakan negara Arab yang bersatu, di bawah kendali Hashemite. Ibn Saud melihat ambisi Raja Yordania ini sebagai ancaman utama, sebagian karena kaum Hashem, dapat mengklaim hubungan silsilah dengan Nabi Muhammad dan dengan demikian mengendalikan kepemimpinan komunitas Islam (Wynbrandt, 2010).

Pada tahun 1980, Irak menyerang Iran. Pada saat itu, rezim Baath yang dipimpin Saddam Hussein dianggap sebagai ancaman bagi kerajaan Saudi. Tetapi, Iran yang dipersepsi Saudi sedang menyebarkan revolusi Islam Syiah di seluruh wilayah timur tengah, dinilai sebagai ancaman yang lebih besar. Oleh karena itu, Arab Saudi memilih untuk mendukung Irak dalam konflik tersebut (Wynbrandt, 2010:245).

Sementara itu, di Mesir, Saudi juga melihat ada ancaman lain. Bangkitnya Nasser di Mesir juga dipersepsi Saudi sebagai ancaman nyata bagi stabilitas politik Saudi karena Nasser menyerukan pan-Arabisme. Saudi semula bekerja sama dengan Mesir untuk melawan Hashemite di Yordania dan Irak pada tahun 1955. Dengan jatuhnya Hashemite, persepsi ancaman Saudi terhadap Mesir karena meningkatnya pengaruh Mesir di dunia Arab seiring dengan seruan Pan-Arabisme dan retorika anti-imperialis Nasser. Selain itu, hubungan di antara kedua aktor ini memburuk karena tindakan represif Nasser terhadap aktivis MB.

Perpecahan antara Mesir dan Saudi memuncak dengan kudeta 1962 di Yaman yang dilakukan kelompok republikan yang didukung Nasser, terhadap kekuasaan monarki Yaman. Kelompok republikan menggulingkan kerajaan dan memproklamkan Republik Arab Yaman (Cleveland, 2008:453). Konflik meningkat menjadi perang proksi antara Mesir dan Arab Saudi. Ketakutan Saudi adalah bahwa gagasan sebuah negara republik akan menyebar di Timur Tengah dan hal ini menjadi ancaman bagi monarki Saudi.

Sejak awal Saudi memahami bahwa mereka tidak akan pernah bisa menjadi aktor hegemon regional, dan kebijakan luar negeri mereka telah mencerminkan hal ini. Saudi memilih cara menyeimbangkan aktor regional untuk menghadang mereka agar mencapai posisi hegemoni. Persepsi ancaman Saudi tidak didasarkan pada kemampuan militer dan alasan materialistis, tetapi lebih terhadap perbedaan ideologis dan tantangan terhadap hak keluarga kerajaan untuk tetap berkuasa.

Kawasan Makah dan Madinah yang merupakan rumah bagi kelahiran agama Islam membuat Dinasti Saudi melihatnya dirinya sebagai pemimpin dunia Muslim. Namun pada tahun 1979 muncul revolusi Islam di Iran yang menciptakan jenis negara baru di kawasan, yang membawa semacam gerakan revolusioner teokrasi yang berpotensi menyebarkan pengaruhnya di kawasan (Marcus, 2019). Kemunculan Iran pun dipandang sebagai ancaman bagi Saudi terutama karena perbedaan ideologi (aliran agama) yang dibawa Iran, yaitu ideologi Syiah.

Pada tahun 1990-an, sumber ancaman terhadap Saudi bergeser ke ancaman domestik, yaitu munculnya kritik dari dalam negeri. Kritik dari para aktor keagamaan Arab Saudi tidak dapat ditekan dengan mudah seperti layaknya oposisi, karena adanya

ketergantungan pemerintah Saudi pada ulama sebagai sumber legitimasi untuk berkuasa. Oleh karena itu, tekanan reformasi berhasil menciptakan perubahan pada tahun 1992, yaitu disahkannya tiga hukum baru: Hukum Dasar Pemerintah, Hukum Dewan Konsultasi, dan Hukum Provinsi. Hukum Pemerintahan menegaskan kembali monarki dan dasar agama yang menjadi dasar pemerintahan Saudi dan menekankan kembali negara sebagai monarki Islam di mana hanya keluarga penguasa yang memiliki hak untuk memerintah (Wynbrandt, 2010:259).

Existential Threat: Evolusi, Ideologi dan Identitas Muslim Brotherhood

Untuk dapat memahami *existential threat* dalam kasus ini, penting untuk dilakukan kajian singkat terhadap evolusi Muslim Brotherhood (MB). Organisasi ini muncul di Mesir lalu berkembang membantuk jaringan yang tersebar di banyak negara di Timur Tengah. Meskipun MB telah dikaitkan dengan kekerasan politik di masa lalu, organisasi ini tercatat telah mengusulkan ideologi yang moderat secara politis (Zollner, 2011). MB didirikan pada tahun 1928 oleh Hasan al-Banna, seorang guru sekolah menengah. MB mencirikan dirinya sebagai gerakan yang mengejar reformasi di bawah naungan Islam untuk isu seperti pendidikan agama, tetapi karena situasi politik yang bergejolak di Mesir selama monarki konstitusional dan kehadiran kolonialisme Inggris, MB pada akhirnya menjadi semacam gerakan sosial-politik (Wickham, 2015).

Dalam ajarannya, Al-Banna berpendapat bahwa Mesir harus kembali ke Islam dan hukum syariah sehingga orang Barat tidak dapat mengendalikan masyarakat Mesir (Wickham, 2015). Hasan al-Banna tidak membentuk MB sebagai partai politik, tetapi perlahan-lahan organisasi itu terlibat dengan pemilihan umum Mesir. Pada pendiriannya, al-Banna menegaskan bahwa MB hanya fokus pada reformasi sosial. Ideologi MB bersifat luas, komprehensif, dan dinilai samar-samar (Al-Anani, 2016:111). Hasan al-Banna memvisualisasikan MB sebagai gerakan yang menyatukan masalah sosial, politik, dan keagamaan. Mantra lama MB adalah "Islam adalah solusinya," hal ini berasal dari karakter komprehensif dari ideologinya (Al-Anani, 2016:111). MB dimulai sebagai gerakan reformasi yang meliputi aspek sosial dan moral, tetapi tumbuh menjadi ideologi yang mencakup semua. MB berargumen bahwa semua harus kembali ke ajaran Islam yang benar, dan menggabungkannya dalam setiap aspek kehidupan. Al-Banna berpendapat bahwa agama Islam dinilai cocok dengan modernitas dunia dan karena itu kaum Muslim perlu mencari cara untuk mengambil keuntungan dari kemajuan teknologi abad kedua puluh tanpa mengorbankan nilai-nilai Islam (Cleveland & Bunton, 2008:199).

Selama tahun 1930-an MB dipandang sebagai gerakan sosial, dengan kegiatannya untuk reformasi moral dan spiritual masyarakat. Namun, dengan transisi gerakan ke politik pada akhir 1930-an, yang dipimpin oleh Al Banna, MB menetapkan

tujuan politik dan eksekutif yang lebih spesifik untuk pemerintahan (Zahid, 2010: 85). Yang pertama adalah mengakhiri sistem kepartaian dan mengarahkan komunitas politik ke satu arah. Menurut beberapa interpretasi teologis dari teks-teks Islam, sistem partai politik dipandang sebagai sesuatu yang jahat yang memungkinkan mengancam jalinan komunitas Islam.

Evolusi dalam ideologi dan identitas MB terjadi pada tahun 1954-1970 ketika mereka dipenjarakan oleh pemerintah Mesir. Identitas dinilai merupakan perwujudan eksistensi diri (Andriasanti, 2014). Selama tahun-tahun inilah Sayyid Quthb menulis *Ma'alim fi al-Tariq* yang sebagian besar terkait dengan terorisme dan Islam radikal. Hal ini menciptakan semangat yang cukup besar di jajaran MB, memberikan anggotanya harapan bahwa mereka akan menjadi pelopor melawan Nasserisme, dan akan meletakkan dasar bagi komunitas Islam yang nyata di Mesir. *Du'at la Qudat* ditulis Hasan al-Hudaybi sebagai kontra-narasi terhadap ajaran Quthb dengan menolak konsep yang diungkapkan dalam *Ma'alim fi al-tariq* dan menegaskan posisi historis MB bahwa melalui da'wa umat Islam dapat dibawa ke tingkat komitmen dan praktik yang lebih tinggi (Zahid, 2010: 89).

Selama beberapa dekade berikutnya, MB secara bertahap membangun posisi politiknya, antara lain dengan mengkritisi liberalisasi ekonomi, privatisasi dan apakah harus berpartisipasi dalam pemilihan umum. Dalam semua masalah ini, MB mengadopsi sikap moderat yang meninggalkan tujuan revolusioner masa lalu mereka, dan berbelok ke arah partisipasi demokratis (Barbra, 2011: 55). Ideologi MB dilihat sebagai sebuah ancaman bagi Saudi karena bertentangan dengan tatanan pemerintahan Saudi yang monarki. Pandangan MB sendiri tentang Islam menjadi tantangan bagi legitimasi agama keluarga kerajaan. Islamisme MB dianggap bertentangan secara signifikan dengan ideologi Wahhabi. Wahhabisme tetap menjadi gerakan konservatif, diperkuat dengan dukungan dari rezim Saudi yang didedikasikan untuk interpretasi literal Al-Quran. Sebaliknya, MB memiliki pendekatan yang lebih akomodatif dalam menafsirkan Alquran yang berpijak pada dunia modern. Perbedaan menjadi jelas pada tahun 1990-an ketika generasi baru MB merevisi ideologi MB agar lebih menarik sebagai kandidat dalam pemilihan Mesir (El-Ghobashy, 2005).

Di era Arab Spring, keterlibatan MB dalam penggulingan rezim Mubarak semakin menghasilkan sebuah kecemasan bagi Saudi sebagai aktor dominan dalam kestabilan Timur Tengah. Apalagi di dalam negeri, anggota MB telah lama menyatu dalam birokrasi peradilan dan pendidikan Saudi. Kerajaan Saudi mengkhawatirkan adanya upaya penggulingan rezim menyusul keberhasilan MB menggulingkan rezim Mubarak. Ambisi yang berkembang dalam MB dari waktu ke waktu juga dapat dilihat sebagai sisi yang mengkhawatirkan bagi rezim Saudi. Pada pendiriannya, Hasan al-Banna bersumpah

bahwa MB tidak akan mencari kekuasaan melainkan tetap menjadi gerakan sosial. Namun MB berubah dari waktu ke waktu untuk menjadi lembaga politik yang pragmatis.

Sekuritisasi Terhadap Muslim Brotherhood

Dalam bagian pembahasan ini penulis akan menggunakan komponen sekuritisasi yakni *securitizing actors*, *audience*, *facilitating conditions* dan *speech act* untuk melihat proses sekuritisasi Saudi terhadap MB sebagai sebuah ancaman keamanan pasca-Arab Spring 2011. Jatuhnya Mesir mendorong Saudi untuk mengambil tindakan guna membendung efek domino. Saudi bahkan menggunakan kekerasan untuk merendahkan kekuatan pro-demokrasi. Tidak hanya di dalam negeri, Saudi juga berperan dalam meredam pengaruh Arab Spring di Bahrain. Raja Abdullah mengirim pasukan ke Bahrain pada 14 Maret 2011 untuk membantu kerajaan Bahrain meredam pemberontakan pro-demokrasi dan menjustifikasi keputusannya itu di bawah kerangka Dewan Kerjasama Teluk (GCC) (Nuruzzaman, 2013). Perlindungan status quo menjadi yang terpenting bagi Saudi yang berupaya meredam berbagai gerakan revolusioner di beberapa wilayah Timur Tengah seperti Yaman dan Suriah, dan memberikan dukungannya kepada Maroko dan Yordania. Saudi merasakan kecemasan keamanan dalam situasi domestiknya dan memandang Arab Spring akan menyebabkan munculnya gerakan yang dirancang untuk melawan keluarga kerajaan Saudi.

Kecemasan ini memiliki akar historis, yaitu gerakan Sahwa yang dimotori oleh aktivis MB yang terusir dari Mesir pada tahun 1960-an. Pada masa itu Saudi menyaksikan perkembangan gerakan sosial besar-besaran yang mempraktikkan bentuk aktivisme Islam modern yang saat itu belum ada dalam tatanan politik negara Saudi. Gerakan ini disebut *Islamic Awakening (al-Sahwa al-Islamiyya)*, atau Gerakan Sahwa (Lacroix, 2011). Gerakan Sahwa adalah istilah Saudi yang mengacu pada semua gerakan politik Islam yang payung utamanya adalah Muslim Brotherhood (Althaydi, 2017). Terlepas dari beberapa penindasan sejak 1990-an, MB telah mempertahankan pengaruhnya selama bertahun-tahun (Ibrahim, 2019). Arab Spring digunakan sebagai sarana bagi kelompok Sahwa untuk memasuki kembali arena politik Saudi. Sejumlah tokoh Sahwa menandatangani petisi pada tahun 2011, termasuk petisi "menuju negara dengan hukum dan institusi" dan "seruan untuk reformasi" (Hedges & Cafiero, 2017).

Ketika Morsi dikudeta oleh Jenderal Al Sisi tahun 2013, pemerintah Saudi memberikan dukungannya kepada Al Sisi, sebaliknya aktivis Al Sahwa di Saudi menyatakan protes mereka atas kudeta itu (Lacroix, 2014). Pemerintahan Mubarak sangat dekat dengan kerajaan Saudi. Kebijakan luar negeri Mesir era Mubarak yang memusuhi Iran didukung dengan seringnya penyebutan Mesir sebagai "benteng terkuat dunia Arab Sunni" terhadap penyebaran pengaruh Iran. Hubungan Mesir-Iran dinilai

berubah setelah naiknya MB dalam politik Mesir. Hal ini membuat Saudi khawatir dan muncul kecurigaan bahwa Mesir di bawah Morsi akan melakukan perubahan geopolitik menuju Iran dan menjauh dari Saudi. Kekhawatiran ini menjadi faktor yang mendorong kerajaan Saudi dan negara-negara Teluk Arab lainnya (dengan pengecualian Qatar) untuk sepenuhnya mendukung penggulingan Morsi pada Juli 2013 (Hedges & Cafiero, 2017).

Kondisi ini merupakan ancaman bagi kerajaan sehingga di sinilah implementasi sekuritisasi dilakukan. Pada 4 Februari 2014, dalam suatu langkah yang diyakini menargetkan pada pendukung MB, kerajaan mengumumkan bahwa:

"Mulai sekarang, keanggotaan dalam kelompok intelektual atau kelompok agama yang ekstrem atau kelompok yang dikategorikan sebagai teroris di tingkat daerah, tingkat regional atau internasional; atau mendukung kelompok-kelompok itu, atau menunjukkan simpati untuk ide-ide dan metode mereka dengan cara apa pun, atau menyatakan dukungan untuk mereka melalui cara apa pun, atau menawarkan dukungan keuangan atau moral, atau menghasut orang lain untuk melakukan semua ini atau mempromosikan apa pun tindakan seperti itu dalam kata atau tulisan akan dihukum dengan hukuman penjara tidak kurang dari tiga tahun dan tidak lebih dari dua puluh tahun" (Lacroix, 2014).

Mengacu kepada teori sekuritisasi, ini adalah bentuk *speech act* yang diimplementasikan oleh Saudi sebagai *securitizing actor* yang mengesahkan penunjukan MB (*existential threat*) sebagai kelompok teroris. *Speech act* ini merupakan *directive speech act* karena adanya permintaan, dan perintah dalam pesan tersebut. Objek dari *speech act* ini adalah sumber legitimasi politik Saudi, yaitu ideologinya, lebih spesifiknya bagaimana agama Islam dipandang dalam tatanan pemerintahan Saudi. Ideologi Saudi menjadi *referent object* dalam kasus ini karena ancaman yang dirasakan diajukan terhadap legitimasi politik Saudi dan bukan terhadap Saudi sebagai suatu entitas. Ini didukung dengan fakta bahwa *referent object* didominasi entitas lain selain aktor, karena kesulitan dalam membenarkan sebuah perlindungan diri (Buzan et al. 1998:40). Dengan kata lain, *referent object* dalam kasus ini mengacu pada hal perlindungan ideologi. Seperti yang diuraikan dalam kerangka analisis bahwa *referent object* dapat dilihat dalam kedaulatan nasional atau ideologi, dalam hal keamanan politik.

Dengan mendeklarasikan situasi darurat, negara secara tegas menggunakan "hak untuk menggunakan segala cara yang diperlukan untuk memblokir perkembangan yang mengancamnya menggunakan tindakan luar biasa (*extraordinary measure*)" (Kurniawan, 2018:19). Kudeta militer yang dilakukan militer Mesir untuk menggulingkan Morsi dengan didukung Saudi pada tahun 2013 merupakan salah satu *extraordinary*

measure yang dilakukan Saudi terhadap MB. Saudi terus melakukan tindakan keras anti-MB, menargetkan institusi tradisional, khususnya dalam bidang pendidikan. Saudi dan negara-negara Teluk lain (kecuali Qatar) melihat Mesir yang stabil di bawah pemerintahan militer sebagai hal yang penting untuk melawan MB. Karena itu, tiga negara Gulf Cooperation Council (GCC), yaitu Arab Saudi, Kuwait, UEA, mengumpulkan paket bantuan \$12 miliar untuk Mesir satu minggu pasca lengsernya Morsi (Nordland, 2013). Ini adalah bagian dari extraordinary measure dan strategi jangka panjang Saudi dalam menggunakan pengaruh untuk mendorong aliansi strategis. Dari perspektif Saudi, Mesir akan lebih condong untuk menyelaraskan dengan Saudi di bawah pembentukan politik yang dipimpin oleh militer daripada terhadap MB (Hedges & Cafiero, 2017).

Komponen lainnya dalam sekuritisasi adalah *audience*, yang dapat menerima masalah sebagai ancaman sehingga mereka melegitimasi *extraordinary measure*. Dalam kasus ini penulis melihat bahwa *audience* di level regional adalah negara-negara anggota GCC, selain Qatar. Di level domestik, *audience* adalah para ulama yang mempunyai keinginan yang sama dengan keluarga kerajaan Saudi untuk mempertahankan *status quo*, sambil mencegah adanya sebuah wujud transformasi demokrasi. Pada awal tahun 2011, Sheikh Abd al-Aziz Al-Sheikh, petinggi agama di Saudi, mengutuk demonstrasi yang terjadi di negara-negara Arab sebagai "tindakan kekacauan yang merusak" yang direncanakan oleh musuh-musuh Islam yang mengakibatkan "penumpahan darah, penyalahgunaan martabat, pencurian uang dan hidup dalam ketakutan dan terror" (Gause, 2011b:8).

Dalam level regional, penerimaan deklarasi MB sebagai kelompok teroris tidak didukung dengan upaya Saudi sebagai pemimpin GCC untuk menekan anggota GCC lain untuk menindak MB dalam upaya membangun "lingkungan keamanan bebas MB" di Semenanjung Arab (Hedges & Cafiero, 2017). Sementara sebagian besar negara anggota GCC memandang MB sebagai ancaman eksistensial, Qatar justru sebaliknya. Hal ini menghasilkan perbedaan pendapat yang menghasilkan krisis diplomatik GCC dengan Qatar.

Pada 2013-2014, Qatar menandatangani serangkaian perjanjian di bawah naungan Dewan Kerjasama Teluk (GCC) untuk menyelesaikan krisis ini secara damai. Perjanjian Riyadh Pertama ditandatangani pada tanggal 23 November 2013 oleh Raja Arab Saudi, Emir Kuwait, dan Emir Qatar, di mana ketiganya berjanji tidak melakukan campur tangan dalam urusan internal negara GCC, tidak memberikan dukungan untuk kelompok-kelompok menyimpang yang menentang negara mereka, tidak memberikan dukungan untuk media yang antagonis, dan tidak memberikan dukungan untuk Muslim Brotherhood atau kelompok lain yang mengancam keamanan dan stabilitas negara-

negara GCC. Bahrain, Oman, dan UEA juga menandatangani perjanjian itu pada hari berikutnya (Gaver, 2020).

Perjanjian Riyadh Kedua dijadikan mekanisme yang menerapkan perjanjian Riyadh pertama. Perjanjian ini mengulangi persyaratan dari perjanjian pertama yang berkaitan dengan operasi media, MB dan keamanan regional; termasuk mandat yang diberikan oleh menteri luar negeri dari setiap negara anggota GCC setiap tahun untuk memastikan kepatuhan berkelanjutan dan bahwa setiap negara mengambil tindakan yang sesuai sebagai tanggapan. Selain itu, jika negara mana pun di negara GCC gagal mematuhi mekanisme ini, negara GCC lainnya berhak mengambil tindakan yang sesuai untuk melindungi keamanan dan stabilitas mereka. Keenam menteri luar negeri GCC menandatangani dokumen tersebut pada 17 April 2014 (Gaver, 2020).

Namun pada tahun 2017, Menteri Luar Negeri Qatar telah mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal GCC yang meminta semua anggota untuk setuju untuk mengakhiri Perjanjian Riyadh (Amlôt, 2020). Surat Qatar itu dianggap sebagai penolakan Perjanjian Riyadh sekaligus menentang Arab Saudi. Arab Saudi pun menggalang aksi boikot terhadap Qatar yang diikuti oleh Mesir, Bahrain, Libia, Uni Emirat Arab, Yaman dan Maladewa. Selain dipicu oleh surat Qatar ini, boikot juga dilakukan karena dalam pandangan, Qatar tidak pernah memenuhi perjanjian 2014 dan terus berfungsi sebagai penghubung jaringan regional MB. Hal ini terlihat antara lain kesediaan Qatar untuk terus menampung pimpinan Hamas yang telah lama diidentifikasi sebagai cabang MB Palestina dan ditetapkan AS sebagai organisasi teroris (Trager, 2017).

Penolakan Qatar untuk menjalankan Perjanjian Riyadh dan aksi Saudi (bersama sejumlah negara GCC lain) untuk memboikot Qatar menunjukkan upaya sekuritisasi yang dilakukan Saudi untuk merespon ancaman MB di kawasan Timur Tengah. Meski Saudi belum berhasil mendorong satu negara anggota GCC (Qatar) untuk mengikuti tuntutananya, namun Saudi merespon dengan melakukan sekuritisasi lanjutan dan langkah luar biasa (*extraordinary measure*), yaitu memboikot Qatar.

Dalam tingkat domestik, pemerintah Saudi melakukan *extraordinary measure* dengan melakukan penangkapan pada para ulama, intelektual, dan aktivis. Merespon dukungan Saudi kepada kudeta di Mesir, beberapa Salafi di sisi lain, terutama dari kelompok Sururi di Arab Saudi, mengkritik pemerintah (Alterman & McCants, 2015:164). Di media sosial, simbol empat jari menjadi lambang pembantaian pendukung MB di Rabaa al-Adwiya di Kairo. Simbol itu sangat banyak digunakan oleh orang masyarakat Saudi di Twitter. Ini menjadi cara publik untuk menunjukkan ketidakpuasan terhadap pemerintah Saudi, dalam isu kebijakan luar negeri (Matthiesen, 2015:5). Arab Saudi mengambil tindakan untuk menekan bentuk-bentuk perbedaan pendapat publik ini,

antara lain menyatakan menggunakan simbol empat jari di Twitter sebagai aksi kriminal. Pemerintah juga menekan penerbit terkemuka, yang telah menjadi titik temu bagi para kritikus Islam terhadap kebijakan pemerintah Saudi (Matthiesen, 2015:5).

Selain itu pula, pada tahun 2017, pemerintah Arab Saudi telah menangkap lebih dari 20 ulama dan intelektual dalam tindakan keras terhadap perbedaan pendapat. Ulama Islam terkemuka Salman al-Odah dan Awad al-Qarni termasuk di antara mereka yang dilaporkan ditahan. Mereka dituduh melakukan "kegiatan spionase dan berhubungan dengan entitas luar, termasuk dengan kelompok MB (BBC, 2017). Kasus lainnya adalah pembunuhan Jamal Khashoggi. Narasi yang berlaku tentang kasus ini adalah bahwa putra mahkota muda Arab Saudi yang memerintahkan penculikan dan pembunuhan untuk membungkam seorang kritikus yang sangat efektif mengkritik keluarga kerajaan. Namun banyak yang berargumen bahwa subplot yang lebih berperan dalam kasus ini adalah karir panjang aktivisme politik Khashoggi yang berhubungan dengan MB (Taylor, 2018).

Namun di sisi lain, seorang mantan anggota MB menyatakan bahwa sekitar 25.000 anggotanya di Saudi bereaksi dengan tidak menonjolkan diri dan membatalkan beberapa pertemuan mereka agar tidak membuat pemerintah marah. Saat itu, mereka mengantisipasi bahwa keputusan kerajaan tersebut hanyalah peringatan dan pemerintah tidak akan menangkap MB secara massal (Alterman & McCants, 2015:164).

Berdasarkan uraian di atas, jawaban dari pertanyaan penelitian ini langkah sekuritisasi terhadap Muslim Brotherhood oleh Saudi Arabia dilandaskan oleh sejarah Saudi dengan isu keamanan. Perubahan persepsi Saudi terhadap MB berubah menjadi sebuah ancaman langsung terhadap stabilitas negara pasca Arab Spring 2011. Hal ini dilihat karena keterlibatan MB dalam revolusi Arab Spring 2011, dimana MB telah berhasil melengserkan Hosni Mubarak di Mesir dan mendorong reformasi berupa tuntutan yang bersifat demokratis. Saudi memandang kesuksesan luas MB setelah Arab Spring 2011 dengan banyak kecurigaan dan kecemasan, dimana sikap pro-demokrasi MB menjadi ancaman bagi rezim otoriter Saudi dan legitimasinya untuk mempertahankan status quo di wilayah Timur Tengah.

Langkah sekuritisasi dengan penetapan MB sebagai organisasi teroris dilakukan Saudi sebagai upaya mencegah penyebaran pengaruh MB di Timur Tengah yang dapat mengganggu tatanan pemerintahan Saudi. Langkah ini juga diikuti oleh adanya krisis diplomatik dengan Qatar. Hal ini terjadi karena Qatar enggan memenuhi tuntutan Saudi sebagai kekuatan regional dan pemimpin GCC, untuk dengan tegas, melanggar hadirnya MB di negara-negara GCC.

Simpulan

Langkah sekuritisasi terhadap Muslim Brotherhood oleh Saudi Arabia dilandaskan oleh sejarah Saudi dengan isu keamanan. Perubahan persepsi Saudi terhadap MB berubah, dari semula sebagai mitra politik menjadi sebuah ancaman terhadap stabilitas negara, terjadi pasca Arab Spring 2011. Keberhasilan MB menggulingkan rezim Mubarak, yang merupakan sekutu Saudi, pada Arab Spring 2011 dan naiknya aktivis MB sebagai Presiden Mesir membuat Saudi memandang MB sebagai ancaman. Saudi enggan membiarkan nilai-nilai ideologis MB (yang membawa ideologi muslim modernis, serta menawarkan demokrasi dan revolusi) berkembang di kawasan regional, khususnya di dalam negeri Saudi sendiri. Saudi mengkhawatirkan gelombang demokratisasi yang dibawa MB di Mesir akan memunculkan tuntutan serupa di Arab Saudi yang artinya mengancam pemerintahan monarki Saudi.

Dengan menggunakan teori sekuritisasi, langkah Saudi dapat dianalisis sebagai berikut. Arab Saudi sebagai *securitizing actor* telah melakukan sekuritisasi terhadap MB yang dipandang sebagai *existential threat* pasca-Arab Spring 2011. Situasi pasca-Arab Spring dipandang Saudi sebagai emergency situation, dilihat dari upayanya untuk memobilisasikan anggota GCC (sebagai *audience*) untuk menyikapi MB. Saudi melihat bahwa upaya reformasi dan tuntutan demokrasi dapat mengganggu tatanan pemerintahan Saudi (*referent object*) dan wilayah Timur Tengah. Saudi kemudian melakukan *speech act* berupa keputusan kerajaan yang menetapkan MB sebagai teroris, diikuti oleh Riyadh Agreement (*facilitating conditions*) untuk mendukung proses sekuritisasi. Ketika ada upaya perlawanan dari Qatar, Saudi memberikan konsekuensi (*extraordinary measure*) berupa pemutusan hubungan diplomatik dan boikot terhadap Qatar. Sementara itu, untuk *audience* di dalam negeri, setelah melakukan *speech act*, pemerintah Saudi melakukan *extraordinary measure* dengan menangkap ulama, intelektual, dan aktivis yang terlibat MB.

Daftar Pustaka

- Andriasanti, L. (2015). Identitas Islam Moderat dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia. *Global: Jurnal Politik Internasional*, [online] 16(1), 84–101. Dalam: <https://doi.org/10.7454/global.v16i1.7> [diakses 15 Juni 2020].
- Al-Anani, K. (2016). *Inside the Muslim Brotherhood: Religion, Identity, and Politics*. Oxford: Oxford University Press.
- Al-Rasheed, M. (2013). Saudi Arabia: Local and Regional Challenges. *Contemporary Arab Affairs*, [online] 6(1), 28–40. Dalam:

<https://online.ucpress.edu/caa/article/6/1/28/26062/Saudi-Arabia-local-and-regional-challenges>. [Diakses 15 Juni 2020].

Alterman, J. and McSants, W. (2015). *Saudi Arabia: Islamists Rising and Falling, in Religious Radicalism after the Arab Uprisings*. [online] Center for Strategic and International Studies. Dalam: <https://www.csis.org/analysis/saudi-arabia-islamists-rising-and-falling> [Diakses 15 Juni 2020].

Althaydi, M. (2017). Has 'Sahwa' ended in Saudi Arabia? *Al Arabiya*, [online]. Dalam: <https://english.alarabiya.net/en/views/news/middle-east/2017/11/03/Has-Sahwa-ended-in-Saudi-Arabia-> [Diakses 14 Oktober 2020].

Amlôt, M. (2020). Qatar Caused Gulf Boycott by Demanding out of Riyadh Agreement: WTO Report. *Al Arabiya*, [online]. Dalam: <https://english.alarabiya.net/en/News/gulf/2020/06/18/Qatar-caused-Gulf-boycott-by-demanding-out-of-Riyadh-Agreement-WTO-report> [Diakses 18 Juni 2020].

Ataman, M. (2003). The Impact of Non-State Actors on World Politics: A Challenge to Nation-States. *Turkish Journal of International Relations*, [online] 2 (1), 42-66. Dalam: <https://www.semanticscholar.org/paper/The-Impact-of-Non-State-Actors-on-World-Politics%3A-A-Ataman/d743da3b82a11163879a3b3e6775e6f76da77ba6> [Diakses 15 Juni 2020]

BBC. (2027). *Saudi Arabia arrests clerics in crackdown on dissent*. [online]. Dalam: <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-41260543>. [diakses 5 Desember 2020]

Balzacq, T. (2011). *Securitization Theory: How Security Problems Emerge and Dissolve*. New York: Routledge.

Balzacq, T., Léonard, S., & Ruzicka, J. (2016). Securitization Revisited: Theory and Cases. *International Relations*, [online] 30(4), 494–531. Dalam: <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0047117815596590> [Diakses 15 Juni 2020].

Buzan, B., Wæver, O., Wilde, Jaap de. (1998) *Security A New Framework for Analysis*. London:Lynne Rienner Publishers.

Charrett, C. (2009). A Critical Application of Securitization Theory: Overcoming the Normative Dilemma of Writing Security. [online] *International Catalan Institute for Peace*. Dalam: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1884149 [Diakses 15 Juni 2020].

- Charountaki, M. (2018): State and Non-state Interactions in International Relations: *British Journal of Middle Eastern Studies* [online]. 45(2):1-15 Dalam: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13530194.2018.1430530> [Diakses 12 Juni 2020]
- Cleveland W.L. (2008). *A History of The Modern Middle East*. Ed.4. Philadelphia: Westview Press.
- Dalacoura, K. (2001). Islamist Movements as Non-state Actors and their Relevance to International Relations. Dalam: D. Josselin and W. Wallace, eds. *Non-state Actors in World Politics*. London: Palgrave Macmillan UK, 235–248.
- Darwich, M. (2017). Creating The Enemy, Constructing The Threat: The Diffusion of Repression Against The Muslim Brotherhood in The Middle East. *Democratization* [online], 24(7), 1289-1306. Dalam <https://doi.org/10.1080/13510347.2017.1307824> [Diakses 12 Juni 2020].
- El-Ghobashy, M. (2005). The Metamorphosis of the Egyptian Muslim Brothers. *International Journal of Middle East Studies*, [online] 37(3), 373–395. Dalam: <https://www.jstor.org/stable/3880106> [Diakses 15 Oktober 2020].
- Emmers, R. (2004). *Non-Traditional Security in the Asia Pacific: The Dynamics of Securitization*. Singapore: Marshall Cavendish International.
- Gallarotti, G., & Al-Filali, I. Y. (2012). Saudi Arabia's Soft Power. *International Studies* [online], 49(3-4), 233-261. Dalam <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0020881714532707> [Diakses 12 Juni 2020].
- Gause, F.G III. (2011a). Saudi Arabia's Regional Security Strategy. Dalam: Mehran Kamrava. *In International Politics of the Persian Gulf*. New York: Syracuse University Press.
- Gause, F. G. III. (2011b). Saudi Arabia in the New Middle East. [online], *Council on Foreign Relations*. Dalam: <https://www.cfr.org/report/saudi-arabia-new-middle-east> [Diakses 5 Juli 2020].
- Gaver, C. (2020). What are the Riyadh Agreements? [online], *Blog of the European Journal of International Law*. Dalam: <https://www.ejiltalk.org/what-are-the-riyadh-agreements> [Diakses 5 Juli 2020].
- Hedges, M. dan Cafiero, G. (2017). The GCC and the Muslim Brotherhood: What Does the Future Hold? *Middle East Policy Council*, [online] 24 (1). Dalam

<https://mepc.org/journal/gcc-and-muslim-brotherhood-what-does-future-hold>
[Diakses 5 Juli 2020].

Ibrahim, A. (2019). What is Sahwa, the Awakening movement under pressure in Saudi? *Aljazeera*, [online]. Dalam: <https://www.aljazeera.com/features/2019/6/5/what-is-sahwa-the-awakening-movement-under-pressure-in-saudi> [Diakses 14 Oktober 2020].

Kirkpatrick, D. (2014). Saudis Put Terrorist Label on Muslim Brotherhood. *New York Times*, [online]. Dalam: <https://www.nytimes.com/2014/03/08/world/middleeast/saudis-put-terrorist-label-on-muslim-brotherhood.html> [Diakses 12 Juni 2020].

Kurniawan, Y. (2018). *The Politics of Securitization in Democratic Indonesia*. New York: Palgrave Macmillan.

Lacroix, S. (2014). Saudi Arabia's Muslim Brotherhood Predicament. *Washington Post*, [online]. Dalam: <https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2014/03/20/saudi-arabias-muslim-brotherhood-predicament/> [Diakses 2 Juli 2020].

Lacroix, S. (2011). *Awakening Islam. The Politics of Religious Dissent*. Cambridge: Harvard University Press.

Lauzière, H. (2016). *The Making of Salafism: Islamic Reform in the Twentieth Century*. New York: Columbia University Press.

Lenz-Raymann, K. (2014). *Securitization of Islam: A Vicious Circle*. Bielefeld: Transcript Verlag.

Leiken, R. S. and Brooke, S. (2007). The Moderate Muslim Brotherhood. [online], *Council on Foreign Relations*. Dalam: <https://www.foreignaffairs.com/articles/2007-03-01/moderate-muslim-brotherhood>.

Macris, J. R. (2016). Investigating the ties between Muhammed ibn Abd al-Wahhab, early Wahhabism, and ISIS. *Journal of the Middle East and Africa*, [online] 7(3), 239-255. Dalam: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/21520844.2016.1227929> [Diakses 15 Oktober 2020].

Marcus, J. (2019). Why Saudi Arabia and Iran are bitter rivals. *BBC*, [online]. Dalam: <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-42008809>. [Diakses 14 Oktober 2020].

- Matthiesen, T. (2015) 'The Domestic Sources of Saudi Foreign Policy: Islamists and the State in The Wake of the Arab Uprisings. [online], *Brooking Institute*. Dalam: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/Saudi-Arabia_Matthiesen_FINALv.pdf [Diakses 14 Oktober 2020].
- Nuruzzaman, M. (2013). Politics, Economics and Saudi Military Intervention in Bahrain', *Journal of Contemporary Asia* [online] 43(2), pp. 363–378. Dalam: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00472336.2012.759406> [Diakses 14 Oktober 2020]
- Nordland, R. (2013). Saudi Arabia Promises to Aid Egypt's Regime. *New York Times*, [online] Dalam: <https://www.nytimes.com/2013/08/20/world/middleeast/saudi-arabia-vows-to-back-egypts-rulers.html> [Diakses 13 Juni 2020].
- Sezer (2013). Securitization of Energy Through The Lenses of Copenhagen School. *West East Journal of Social Sciences*, [online], 2(2). Dalam: <https://www.westeastinstitute.com/wp-content/uploads/2013/04/ORL13-155-Sezer-Ozcan-Full-Paper.pdf> [Diakses 10 Juni 2020].
- Stengel, F. dan Baumann, R. (2017). Non-State Actors and Foreign Policy. Dalam: Oxford Research Encyclopedia of Foreign Policy Analysis, Oxford University Press.
- Stritzel, H. (2014). *Security in Translation: Securitization Theory and The Localization of Threat*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Taufika, R. (2020). Latent Securitisation of Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing in Indonesia. *Global: Jurnal Politik Internasional*, [online] 22(1), 26-53. Dalam: <http://global.ir.fisip.ui.ac.id/index.php/global/article/view/488> [Diakses 10 Juni 2020].
- Taylor, G. (2018). Jamal Khashoggi killing sparked by Muslim Brotherhood ties. *The Washington Post*. [online]. Dalam <https://apnews.com/article/f6d02c4d90ac9d00f3fea5d29c7400db> [diakses 5 Desember 2020].
- Trager, E. (2017). The Muslim Brotherhood Is the Root of the Qatar Crisis. *The Atlantic*, [online]. Dalam: <https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/07/muslim-brotherhood-qatar/532380/> [Diakses 20 Juni 2020].
- Vermonte, P. J. (2003). Isu Terorisme Dan Human Security: Implikasi Terhadap Studi Dan Kebijakan Keamanan. *Global: Jurnal Politik Internasional*, [online]. 5(2), 27-26. Dalam: <https://doi.org/10.7454/global.v5i2.211>. [Diakses 20 Juni 2020].

- Vuori, J.A. (2008). Illocutionary Logic and Strands of Securitization: Applying the Theory of Securitization to the Study of Non-Democratic Political Orders. *European Journal of International Relations*, [online] 14 (1). Dalam: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1354066107087767> [Diakses 9 Juni 2020].
- Weenink, A. W. (2001). The Relevance of Being Important or the Importance of Being Relevant? State and Non-state Actors in International Relations Theory. Dalam: B. Arts, M. Noortmann, R. Reinalda, eds., *Non-State Actors in International Relations*. Hampshire: Ashgate Publishing Limited.
- Wickham, C. R. (2015). *Muslim Brotherhood - Evolution of an Islamist Movement*. New Jersey: Princeton University Press.
- Wynbrandt, J. (2010). *A Brief History of Saudi Arabia*. New York: Facts On File.
- Zahid, M. (2010). *Muslim Brotherhood and Egypt's Succession Crisis: The Politics of Liberalisation and Reform in the Middle East*. New York: I.B. Tauris.
- Zollner, B. H. (2011). *The Muslim Brotherhood: Hasan al-Hudaybi and Ideology*. London: Routledge.